

KIK  
Per 49.01  
K.15  
t

# SKRIPSI

NOOR KHOLILLA

## TANGGUNG JAWAB PJTKI DAN DEPNAKER DALAM KAITANNYA DENGAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA

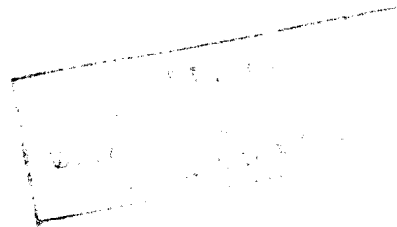


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2001

**TANGGUNG JAWAB PJTKI DAN DEPNAKER DALAM KAITANNYA  
DENGAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP  
TENAGA KERJA INDONESIA**

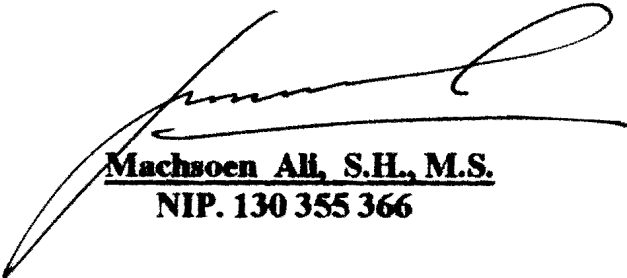
**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA HUKUM BIDANG ILMU HUKUM**




**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 355 366**



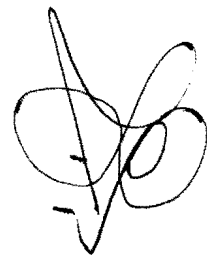
**Noor Khojilla**  
**NIM. 039714520**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

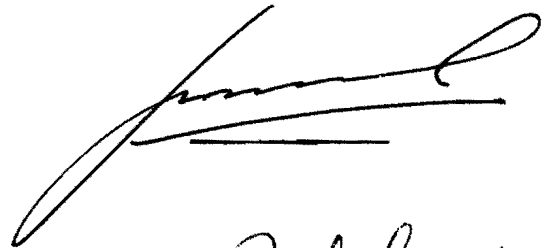
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

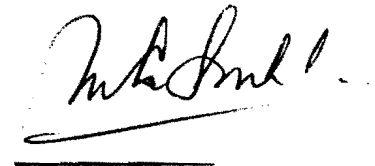
**Ketua : R. Indiarsono, S.H.**



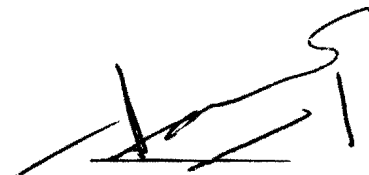
**Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.**



**2. Dr. Maarten Lendert Souhoka, S.H., M.S.**



**3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan permasalahan mengenai tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia, maka berikut ini kesimpulan dari pembahasan tersebut :

1. Perlindungan hukum bagi calon Tenaga Kerja Indonesia dimulai sejak dari daerah asal calon Tenaga Kerja Indonesia sampai purna tugas dan kembali ke daerah asal atau perlindungan dimulai saat pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan.
2. Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja meliputi :
  - a. mengurus perawatan atau pemakaman jenazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui perwalu dan mitra usahanya;
  - b. mengurus harta peninggalan dan hak-hak TKI yang belum diterima untuk diserahkan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan;

- c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia;
  - d. mengurus klaim asuransi dan menyampaikan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan.
3. Tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja adalah melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan mengenai penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan kecelakaan kerja Menteri Tenaga Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-92/MEN/1998 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui asuransi serta Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP-107/BP/1999 tentang petunjuk teknis perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui asuransi serta Undang-undang No. 3 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang hal ini berkaitan dengan penerapan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi yang terdiri dari teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara (skorsing), dan pencabutan SIUP-PJTKI.

### **Saran**

1. Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia juga meliputi perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia terhadap petugas Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang tidak diketahui oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat serta terhadap

calon dan oknum yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa untuk memberangkatkan ke luar negeri.

2. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja diharapkan dapat lebih konsekuen dan komitmen terhadap tanggung jawabnya. Selain itu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia diharapkan dapat menjamin bahwa Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan keselamatan, kenyamanan, dan lingkungan kerja yang tepat.
3. Pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-204/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri pada bab IX yang mengatur masalah sanksi, sanksi yang diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja hanya berupa sanksi administrasi, penulis berpendapat sanksi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja perlu juga diterapkan mengenai sanksi pidana yang ditujukan pada oknum dari Perusahaan Jasa Tenaga. Selain itu Pemerintah dapat mengadakan atau membuat kesepakatan (tentang tenaga kerja) semacam bilateral agreement yang menyangkut perlindungan hukum dan hak-hak tenaga kerja.

